

Fungsionalisme Terintegrasi Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Desa di Sultra: Perspektif Malinowski Bagi Solusi Masalah Sosial dan Lingkungan

La ode Aris¹, Laxmi^{2*}, Hasniah³, Wa Ode Winesty Sofyani⁴

^{1,2,3,4}Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: laxmi77antro@yahoo.com

Abstract. *Non-governmental organizations (NGOs) play a strategic role in empowering rural communities, particularly in regions characterized by high levels of social, economic, and environmental vulnerability. This article aims to analyze the role of Komnas Desa of Southeast Sulawesi in rural community empowerment through the perspective of integrated functionalism as proposed by Bronislaw Malinowski. This study employs a qualitative approach, utilizing field observations, in-depth interviews, and documentation analysis conducted through field-based academic activities. The findings reveal that Komnas Desa Southeast Sulawesi adopts a participatory approach rooted in the local socio-cultural context in implementing programs related to economic empowerment, environmental advocacy, public health, and disaster management. From the perspective of integrated functionalism, these programs function as interconnected components within the social system that collectively address the fundamental needs of rural communities. The application of functionalist and applied anthropological perspectives enables NGO interventions to become more adaptive to local conditions, socially accepted by community members, and effective in strengthening local capacities. This study highlights the importance of integrating anthropological theory into community empowerment practices as a sustainable strategy for addressing social and environmental challenges in rural areas.*

Keywords: *Applied Anthropology; Integrated Functionalism; Non-Governmental Organization; Rural Community Empowerment; Southeast Sulawesi.*

Abstrak. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di wilayah dengan tingkat kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang relatif tinggi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Komnas Desa Sulawesi Tenggara dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan menggunakan perspektif fungsionalisme terintegrasi yang merujuk pada pemikiran Bronislaw Malinowski. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi yang diperoleh melalui kegiatan akademik berbasis lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komnas Desa Sultra menerapkan pendekatan partisipatif yang berakar pada konteks sosial dan budaya masyarakat lokal dalam berbagai program, meliputi pemberdayaan ekonomi, advokasi lingkungan, kesehatan masyarakat, serta manajemen kebencanaan. Perspektif fungsionalisme terintegrasi memungkinkan analisis terhadap fungsi lembaga dan program yang dijalankan sebagai bagian dari sistem sosial yang saling terkait dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis fungsionalisme dan antropologi terapan menjadikan program-program Komnas Desa lebih adaptif terhadap kondisi lokal, mudah diterima oleh masyarakat, serta berkontribusi nyata dalam memperkuat kapasitas sosial dan keberlanjutan lingkungan di tingkat desa. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi pendekatan teoritis antropologi dalam praktik pemberdayaan masyarakat desa sebagai solusi atas persoalan sosial dan lingkungan.

Kata kunci: Antropologi Terapan; Fungsionalisme Terintegrasi; LSM; Pemberdayaan Masyarakat Desa; Sulawesi Tenggara.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan struktural, seperti kemiskinan, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial, serta lemahnya posisi tawar masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, budaya, dan kelembagaan yang saling terkait. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa (Kementerian Desa PDTT, 2014).

Dalam konteks tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai aktor non-negara yang strategis dalam menjembatani kepentingan masyarakat desa dengan kebijakan pembangunan. LSM memiliki fleksibilitas, kedekatan sosial, serta kemampuan untuk menerapkan pendekatan partisipatif yang kontekstual dengan kondisi lokal. Yulianti (2022) menegaskan bahwa LSM berkontribusi penting dalam pembangunan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas masyarakat, advokasi kebijakan, dan pengembangan model pemberdayaan berbasis komunitas.

LSM Komnas Desa Sulawesi Tenggara hadir sebagai respons atas kondisi sosial ekonomi masyarakat desa, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap persoalan kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan keterbatasan layanan publik. Dalam praktiknya, Komnas Desa Sultra mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif yang memperhatikan konteks sosial dan budaya lokal. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif fungsionalisme terintegrasi sebagaimana dikemukakan oleh Malinowski (1944), yang memandang lembaga sosial sebagai bagian dari sistem budaya yang berfungsi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Perspektif ini kemudian diperkaya dalam kajian antropologi Indonesia oleh Koentjaraningrat (1981, 2014), yang menekankan pentingnya memahami struktur sosial dan kebudayaan masyarakat dalam proses pembangunan.

Pendekatan fungsionalisme terintegrasi juga relevan dalam menganalisis dinamika masyarakat pesisir dan kepulauan, seperti yang terjadi di wilayah Wawonii, Sulawesi Tenggara, yang menghadapi persoalan pengelolaan sumber daya desa dan lingkungan. Melalui pendampingan yang dilakukan oleh LSM komunitas desa, pendekatan antropologi terapan memungkinkan pemecahan persoalan sosial dan lingkungan secara lebih kontekstual dan berkelanjutan (Ahimsa-Putra, 2015; Nurhayati & Setiawan, 2018). Pengalaman Malinowski dalam studi masyarakat desa di Papua Nugini Tenggara menunjukkan bahwa pemahaman mendalam terhadap fungsi lembaga sosial lokal dapat menjadi dasar bagi intervensi pembangunan yang efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Komnas Desa Sulawesi Tenggara menjalankan fungsi kelembagaannya dalam pemberdayaan masyarakat desa serta relevansinya dengan pendekatan fungsionalisme terintegrasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan antropologi terapan serta

kontribusi praktis bagi penguatan peran LSM dalam mengatasi persoalan sosial dan lingkungan di wilayah pedesaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis pada tulisan ini dengan menempatkan perspektif Malinowski melalui teori Fungsionalisme (1944) terintegrasi dalam memandang fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Desa dalam menjalankan programnya di masyarakat khususnya pada pesisir kepulauan di Wawonii. Secara teoritis Malinowski banyak menulis kondisi masyarakat yang berada di kawasan pesisir dan kepulauan, salah satu karyanya yang terkenal adalah fungsionalisme berintegrasi di Kepulauan Trobriand Papua Nuigini melalui kehidupan masyarakat yang berlayar antar pulau lalu menukarkan benda-benda tersebut di lokasi pesisir kunjungannya seperti makanan, barang kerajinan, alat-alat perikanan, perkebunan, alat rumah tangga, serta barang-barang yang bernilai tinggi seperti perhiasan yang berupa kalung, gelang, terbuat dari kerang-kerang. Dari sistem perdagangan antar pulau ini menunjukkan hubungan berkait antara pulau-pulau di sekitarnya dan hubungan kekayaan alam penduduk dan mata pencahariannya. Secara teoritis fungsionalisme Malinowski menggambarkan bahwa dari sistem tersebut terdapat penamaan “sistem kula” karena menghubungkan jaringan antar pulau dan sistem tukar menukar yang terkait pola pola pencaharian masyarakat. Memandang kajian teoritis Malinowski maka dapat di katakan bahwa terdapat fungsi yang telah di jalankan oleh satu komunitas desa di pesisir kepulauan Wawonii melalui pola hubungan antar masyarakat pesisir dengan model jaringan pemberdayaan lintas masyarakat, fungsionalisme LSM komunitas desa tidak hanya didasarkan sebagai peningkatan ekonomi, tetapi juga sebagai proses penguatan kapasitas sosial, kesadaran kritis, dan kemandirian komunitas. Oleh karena itu, intervensi programnya perlu disesuaikan dengan konteks budaya agar mendukung kebutuhan masyarakat dampingan di kepulauan Wawonii. Sejak awal pendampingan telah terlihat fungsionalisme terintegrasi yang di lakukan LSM Komunitas Desa karena kegiatan pendampingan telah mengadopsi program berintegrasi yaitu sebagai fasilitator, mediator, dan advokator kepentingan masyarakat. Kelembagaan LSM Komnas Desa terlihat tidak hanya bekerja pada level teknis, tetapi juga berada dalam arena relasi kekuasaan, dengan melalui komunikasi persuasif terhadap pengambil kebijakan, menyesuaikan dengan budaya setempat, dan pengetahuan lokal masyarakat menjadi acuan pelaksanaan program. Pada sisi ini telah terlihat bahwa keberhasilan LSM sangat ditentukan oleh kemampuannya membaca dinamika sosial dan membangun kepercayaan masyarakat. Kondisi inilah yang terjadi pada LSM

Komnas Desa yang telah mengantarkan dampungnya pada pendekatan kultural, sehingga penerapan fungsionalisme terintegrasi dapat terlihat nyata pada program ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui kegiatan wawancara biasa, wawancara mendalam bersama pendiri dan Fasilitator di LSM Komnas Desa Sultra serta di dukung pada pengumpulan data meliputi observasi langsung di kantor, studi dokumentasi dan analisis komprehensif terhadap laporan dan arsip lembaga LSM Komunitas Desa yang telah melalui proses pendampingan. Data dianalisis secara interpretatif dengan menekankan pada hasil pendampingan di masyarakat pesisir kepulauan dan praktik pemberdayaan yang dilakukan LSM.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Program Komnas Desa Sultra

Komnas Desa Sulawesi Tenggara (Komnas Desa Sultra) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang lahir sebagai respons terhadap berbagai persoalan struktural yang dihadapi masyarakat desa, khususnya di wilayah pesisir dan pedesaan terpencil di Sulawesi Tenggara. Kehadiran Komnas Desa Sultra tidak dapat dilepaskan dari konteks pembangunan yang cenderung bersifat top-down, eksploitatif terhadap sumber daya alam, serta kurang memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan. Dalam situasi tersebut, Komnas Desa Sultra memposisikan diri sebagai aktor masyarakat sipil yang berperan menjembatani kepentingan masyarakat lokal dengan kebijakan pembangunan formal.

Secara kelembagaan, Komnas Desa Sultra bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan pendekatan partisipatif dan berbasis konteks sosial-budaya lokal. Lembaga ini menempatkan masyarakat desa bukan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta kapasitas untuk mengelola kehidupannya sendiri. Prinsip ini tercermin dalam strategi pendampingan yang menekankan dialog, penguatan kapasitas lokal, dan pengakuan terhadap struktur sosial yang telah ada di masyarakat.

Komnas Desa Sultra berdiri sebagai respons terhadap marginalisasi masyarakat desa, khususnya di wilayah pesisir. Program-program yang dijalankan meliputi pemberdayaan ekonomi, pengembangan usaha mikro, pengelolaan sumber daya alam, advokasi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan manajemen bencana. Proses pendampingan LSM

tercermin dalam cara Komnas Desa Sultra merancang dan melaksanakan program. Dalam pemberdayaan ekonomi, lembaga ini memperhatikan struktur kekerabatan dan modal sosial masyarakat. Dalam advokasi lingkungan, Komnas Desa Sultra mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan kebijakan formal. Program kesehatan dan manajemen bencana juga disesuaikan dengan kepercayaan serta praktik budaya masyarakat setempat. Adanya model pendekatan partisipatif yang digunakan memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program, sehingga meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas intervensi sosial.

Analisis Data Temuan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai institusi sosial yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat lokal. Peran LSM sebagai fasilitator, mediator, dan advokator memperlihatkan fungsi strategisnya dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan struktur formal, sekaligus mendorong perubahan sosial yang kontekstual.

Pendekatan pemberdayaan yang bersifat partisipatif menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi menunjukkan pengakuan terhadap kapasitas lokal dan memperkuat rasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Dalam bidang ekonomi, penguatan usaha mikro berbasis komunitas memanfaatkan modal sosial dan jaringan kekerabatan sebagai sumber daya utama. Strategi ini menegaskan bahwa praktik ekonomi lokal tidak terlepas dari struktur sosial dan nilai budaya masyarakat.

Integrasi pengetahuan ekologis lokal dalam advokasi lingkungan dan manajemen bencana menunjukkan pengakuan terhadap pengetahuan tradisional sebagai sistem adaptasi yang relevan dan berkelanjutan. Hal ini memperkuat legitimasi sosial program serta meningkatkan efektivitas intervensi. Pada aspek kesehatan, penyesuaian bahasa dan kebiasaan lokal mencerminkan sensitivitas budaya yang berpengaruh positif terhadap penerimaan masyarakat. Sementara itu, pendampingan jangka panjang membangun kepercayaan sebagai modal sosial penting bagi keberlanjutan program.

Secara keseluruhan, temuan ini mencerminkan pendekatan fungsionalisme terintegrasi, di mana program LSM di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial dan budaya saling terintegrasi untuk mendukung keberlangsungan sistem sosial masyarakat. Berikut tabel ringkasan data temuan fungsionalisme terintegrasi terhadap peran LSM Komnas Desa Sulawesi Tenggara:

Tabel 1. data temuan fungsionalisme terintegrasi.

No.	Peran Sosial	Bentuk Praktik Solusi di Lapangan	Aspek Temuan Fungsionalisme Terintegrasi
1.	Peran Kelembagaan LSM	LSM berperan sebagai fasilitator, mediator, dan advokator dalam pendampingan masyarakat desa pesisir	Menunjukkan fungsi sosial LSM sebagai institusi yang terintegrasi dalam sistem sosial
2.	Pendekatan Pemberdayaan	Program dirancang secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak perencanaan hingga evaluasi	Masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan
3.	Pemberdayaan Ekonomi	Penguatan usaha mikro dan kelompok usaha berbasis komunitas sesuai mata pencaharian lokal	Pemanfaatan modal sosial dan struktur kekerabatan
4.	Advokasi Lingkungan	Integrasi pengetahuan ekologis lokal dengan kerangka kebijakan formal	Pengakuan terhadap pengetahuan lokal sebagai sumber legitimasi sosial
5.	Program Kesehatan	Penyampaian informasi kesehatan disesuaikan dengan bahasa dan kebiasaan lokal	Sensitivitas budaya meningkatkan penerimaan program
6.	Manajemen Bencana	Pemanfaatan pengetahuan lokal tentang tanda-tanda alam dan strategi bertahan hidup	Integrasi pengetahuan tradisional dan pendekatan modern
7.	Relasi Sosial	Pendampingan jangka panjang membangun kepercayaan masyarakat	Kepercayaan sebagai modal sosial keberlanjutan program
8.	Fungsi sosial	Program Program ekonomi, lingkungan, dan sosial saling terintegrasi	Mencerminkan fungsionalisme terintegrasi Malinowski

Berdasarkan hasil temuan di lapangan maka di gunakan perspektif Heddy Shri Ahimsa- Putra (2012) untuk membaca data, bahwa LSM dipahami sebagai arena sosial tempat berjalannya aktor, struktur, dan sistem makna dalam praktik pembangunan. Pendampingan yang dilakukan oleh LSM Komnas Desa (Komdes) Sultra menunjukkan proses mediasi antara pengetahuan lokal masyarakat desa dengan wacana pembangunan formal, di mana LSM berperan sebagai penerjemah sosial antara kebijakan dan realitas budaya lokal, di kuatkan oleh Ahimsa-Putra (2007) melalui posisi tersebut, Komdes Sultra tidak hanya menyalurkan

program, tetapi juga membentuk ruang dialog antara kepentingan masyarakat, negara, dan aktor pembangunan lainnya.

Program pemberdayaan yang bersifat partisipatif tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga membangun legitimasi dan kepercayaan sosial melalui interaksi yang berkelanjutan. Penguatan atas kerja pemberdayaan ini kembali di tegaskan Ahimsa-Putra (2015). Kepercayaan ini menjadi modal sosial penting yang memperkuat keberlanjutan program serta meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan. Dengan demikian, praktik Komdes Sultra mencerminkan fungsionalisme terintegrasi secara kontekstual, keberhasilan intervensi telah terlihat dari kesesuaian program dengan struktur sosial, nilai budaya, dan relasi kekuasaan masyarakat lokal

Temuan penelitian pada LSM Komnas Desa (Komdes) Sulawesi Tenggara juga menunjukkan bahwa praktik pendampingan masyarakat berakar kuat pada sistem sosial dan budaya lokal, tentunya dalam perspektif fungsionalisme Bronislaw Malinowski (1944), setiap institusi sosial memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan individu dan menjaga keberlangsungan sistem sosial. Peran Komdes Sultra sebagai fasilitator, mediator, dan advokator mencerminkan fungsi sosial LSM sebagai institusi yang berkontribusi terhadap stabilitas sosial masyarakat desa. Melalui pendekatan pemberdayaan partisipatif yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi selaras dengan konsep ekologi budaya Julian H. Steward (1955), yang menekankan hubungan timbal balik antara manusia, lingkungan, dan strategi adaptasi budaya. Program ekonomi, lingkungan, dan manajemen bencana yang disesuaikan dengan kondisi lokal menunjukkan bentuk adaptasi sosial-ekologis masyarakat yang difasilitasi oleh Komdes Sultra.

Integrasi pengetahuan lokal dalam program lingkungan dan kesehatan yang telah di jalankan dapat pula di analisis melalui perspektif interpretatif Clifford Geertz (1973) yang memandang kebudayaan sebagai sistem makna. Pengetahuan dan praktik lokal berfungsi sebagai simbol budaya yang memperkuat legitimasi sosial program serta meningkatkan penerimaan masyarakat. Selain itu, pendampingan jangka panjang yang membangun kepercayaan mencerminkan konsep modal sosial Pierre Bourdieu (1986), di mana jaringan sosial, relasi timbal balik, dan kepercayaan menjadi sumber daya penting bagi keberlanjutan program pemberdayaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa LSM Komnas Desa Sulawesi Tenggara berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui penerapan pendekatan fungsionalisme

terintegrasi yang kontekstual dan partisipatif. Pendekatan tersebut tercermin dalam perancangan dan pelaksanaan program yang memperhatikan struktur sosial, kekerabatan, pengetahuan lokal, serta nilai dan praktik budaya masyarakat setempat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa integrasi antara pengetahuan lokal dan kerangka kebijakan formal, khususnya dalam bidang pemberdayaan ekonomi, advokasi lingkungan, kesehatan, dan manajemen bencana, berkontribusi pada meningkatnya partisipasi masyarakat dan rasa kepemilikan terhadap program. Namun, temuan ini bersifat kontekstual dan terbatas pada pengalaman Komnas Desa Sultra, sehingga generalisasi hasil penelitian perlu dilakukan secara general. Berdasarkan kesimpulan tersebut, sangat diperlukan agar Komnas Desa Sultra terus memperkuat pendekatan partisipatif dengan meningkatkan kapasitas internal lembaga serta memperluas kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Selain itu, dokumentasi sistematis terhadap praktik-praktik berbasis pengetahuan lokal perlu ditingkatkan agar dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi dan sumber data yang sebagian besar diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dalam waktu terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian, menggunakan metode yang lebih variatif, serta melibatkan analisis komparatif antar lembaga guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pendekatan Malinowski dalam pemberdayaan masyarakat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada LSM Komnas Desa yang telah memberikan data untuk menyempurnakan laporan penelitian ini. Kepada masyarakat di Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara serta kepada tim peneliti mahasiswa dan dosen yang telah turun lapangan untuk penyusunan laporan artikel ini. Artikel ini merupakan bagian tugas makalah perkuliahan yang telah di uraikan untuk di analisis.

DAFTAR REFERENSI

- Ahimsa-Putra, H. S. (2007). Paradigma, epistemologi, dan metode dalam antropologi. *Humaniora*, 19(1), 1–16.
- Ahimsa-Putra, H. S. (2012). *Paradigma ilmu sosial-budaya: Sebuah pandangan*. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Ahimsa-Putra, H. S. (2015). *Antropologi terapan: Peran antropologi dalam pemecahan masalah sosial-budaya*. Kepel Press.

- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Dalam J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (hlm. 241–258). Greenwood Press.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Koentjaraningrat. (1981). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Djambatan.
- Koentjaraningrat. (2014). *Pengantar antropologi I*. Rineka Cipta.
- Komnas Desa Sulawesi Tenggara. (2018). *Profil dan arah gerakan Komnas Desa Sulawesi Tenggara*. Komnas Desa Sulawesi Tenggara.
- Komnas Desa Sulawesi Tenggara. (2020). *Laporan kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat*. Komnas Desa Sulawesi Tenggara.
- Komnas Desa Sulawesi Tenggara. (2022). *Dokumen internal strategi pendampingan desa*. Komnas Desa Sulawesi Tenggara.
- Malinowski, B. (1944). *A scientific theory of culture and other essays*. University of North Carolina Press.
- Nurhayati, S., & Setiawan, A. (2018). *Antropologi terapan: Konsep dan implementasi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Steward, J. H. (1955). *Theory of culture change: The methodology of multilinear evolution*. University of Illinois Press.
- Yulianti, A. (2022). Peran LSM dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 45–58.